

KEMELUT POLITIK THAILAND TAHUN 2023: ANTIKLIMAKS JALAN PERUBAHAN MENUJU DEMOKRASI

Novriest Umbu Walangara Nau
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana
novriest.umbu@uksw.edu

Abstract

Move Forward, a progressive party secure a historic win in the 2023 Thailand general election and nominated Pita Limjaroenrat as the new Prime Minister. However, Move Forward was thwarted in parliament and betrayed by its coalition partner Pheu Thai which shifted to support the royalist party. The anticlimax of Move Forward's victory poses a major challenge to Thailand's efforts towards a more democratic direction. This paper examines the dynamics of Thai politics and its prospects for democracy after the 2023 election by utilizing the idea of Constructivism and employing a literature study method. This paper argues that Move Forward's victory is a strong signal of the waning public support for pro-military and royalist parties. Move Forward's ability to attract the support of Pheu Thai loyalists and to win the upcoming election with sufficient margin of victory are going to be pivotal.

Keywords: *Move Forward, Pheu Thai, General Election, Democracy*

PENDAHULUAN

Masyarakat Thailand mengalami dinamika yang amat besar dalam proses pemilihan umum di tahun 2023. Kontestasi politik di Thailand menempatkan Partai Move Forward sebagai pemenang. Move Forward dipimpin Pita Limjaroenrat berhasil merebut kursi terbanyak di parlemen Thailand dan menguasai 152 kursi, disusul partai oposisi lainnya, Pheu Thai, yang merebut 141 kursi. Hasil pemilu tersebut menempatkan Move Forward dan Pheu Thai memiliki kekuasaan atas mayoritas kursi di parlemen yang beranggotakan 500 orang (Küing, 2023). Kemenangan Move Forward terasa begitu mengejutkan mengingat keberadaannya sebagai pendatang baru di perpolitikan Thailand. Implikasi nyata dari kemenangan Move Forward adalah munculnya goncangan besar yang diarahkan kepada elit berkuasa di Thailand. Eksistensi elit politik Thailand menjadi terancam dengan kemunculan, terlebih kemenangan Move Forward. Kondisi tersebut direspon pihak pro-militer dan kerajaan dengan menjegal langkah Pita Limjaroenrat sebagai pemimpin Move Forward yang memenangkan pemilu untuk menjadi

Perdana Menteri Thailand yang baru dan menimbulkan gejolak politik yang masif ditengah masyarakat.

Momentum penyelenggaraan demokrasi hadir kembali setelah terakhir kali di tahun 2019 masyarakat Thailand mengikuti pemilihan umum. Pada masa itu, suara-suara perubahan mengenai kekuasaan raja dan kelompok militer mengemuka dan dipimpin oleh kelompok pemuda di Thailand yang sudah resah dengan besarnya pengaruh militer dan kerajaan ditengah kehidupan masyarakat (Pangestu, 2023). Namun demikian, baik pihak militer maupun kerajaan masih mampu terus memelihara kekuatannya. Thailand adalah negara monarki dimana pihak kerajaan ditempatkan sebagai bagian integral unsur pemersatu dan pilar spiritual dan stabilitas Thailand. Thailand menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer sejak tahun 1932. Raja tidak terlibat dalam politik praktis namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif (parlemen), eksekutif (perdana menteri dan kabinet) dan yudikatif (badan peradilan). Pada abad ke-21 ini, demokrasi Thailand tidak lepas dari proses pasang surut, ditandai dengan adanya berbagai krisis politik dari berbagai pihak yang berseberangan pandangan dan ideologi di antara kelompok masyarakat Thailand (Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, 2020).

Pihak oposisi pemerintah berasal dari kaum muda yang terus menyerukan reformasi di negara mereka. Sasaran kritik diarahkan pada pihak pemerintah militer yakni Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha—mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 yang dianggap memerintah dengan cara otoriter, menuntut adanya pembaharuan terhadap konstitusi yang dipandang sangat melindungi kerajaan maupun pihak militer, juga menekankan perlunya proses yang demokratis melalui pemilihan umum secara reguler dalam perpolitikan Thailand. Tuntutan ini dilanjutkan dengan menyasar salah satu ranah yang paling sensitif di Thailand, yakni mengatur ulang kekuasaan raja melalui konstitusi. Menentang posisi raja tentu saja merupakan gebrakan yang begitu berani mengingat adanya hukum *lese majeste* yang mengatur larangan atas segala bentuk penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Bila

mengacu pada peristiwa politik yang terjadi di tahun 2020, tidak lama selepas pemerintahan Chan-ocha membentuk kabinet yang baru, nampaknya kemarahan masyarakat pendukung reformasi dapat dipahami. Sebabnya, partai pro demokrasi Future Forward Party (FFP) yang dipimpin oleh Thanathorn Juangroongruangkit dibubarkan. FFP begitu populer di kalangan anak muda, dianggap sebagai partai yang mewadahi aspirasi dan impian mereka untuk mengubah wajah Thailand. Bahkan FFP berhasil memperoleh kursi terbesar ketiga dalam pemilu tahun 2019 (BBC News, 2020). Oleh karenanya, protes besar-besaran terjadi dan kaum pro reformasi terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah Thailand.

Pemilihan umum kembali dilangsungkan pada tahun 2023 ini menghadirkan gejolak yang tak kalah besarnya. Masyarakat Thailand yang mendukung perubahan pada awalnya memperoleh oleh angin segar dengan kiprah partai Move Forward yang berhasil mendobrak tidak hanya petahana, namun juga sesama partai oposisi yang sudah lebih dulu menancapkan kuku di panggung perpolitikan Thailand, Pheu Thai. Move Forward melesat dan memenangkan hati para pemilih muda bahkan juga kelompok dewasa yang menaruh simpati terhadap perjuangan para pelajar yang masih belia. Kemenangan Move Forward awalnya disebut-sebut menjadi harapan baru akan perubahan besar-besaran di Thailand, yang oleh banyak orang disebut sebagai 'gempa politik'. Kemenangan Move Forward menandai dua hal. Satu, pemilih secara jelas tidak berpihak pada partai pro pemerintah dan militer. Dua, pengaruh Thaksin Shinawatra pudar. Partainya di luar dugaan kalah dengan margin yang cukup mencengangkan dari Move Forward. Para pemilih muda dibawah 26 tahun sejatinya adalah kelompok kecil dengan jumlah 14% dari 52 juta pemilih. Mereka lalu berjuang dan mendorong pemilih lebih tua untuk mendukung partai Move Forward dengan mengharapkan masa depan yang lebih baik untuk generasi muda (Head, 2023a). Keberhasilan para pendukung Move Forward mengantarkan Pita Limjaroenrat memenangi pemilihan umum lantas menjadi tak berarti karena Senat menggagalkan naiknya Pita menjadi Perdana Menteri yang baru. Kebuntuan politik berakhir antiklimaks dengan membelotnya Pheu Thai dari koalisi bersama Move

Forward dan anggota koalisi lainnya, yang ujungnya adalah dilantiknya Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai sebagai perdana menteri baru Thailand.

Tulisan ini hendak mendiskusikan kemelut politik di Thailand yang telah sejak lama bergulir, dan kembali terulang dengan guncangan yang sangat besar di tahun 2023, sekaligus mendiskusikan prospek demokrasi di Thailand pasca naiknya Srettha Thavisin sebagai perdana menteri. Sebagai catatan penting, Thailand kini dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru. Namun demikian, tulisan ini menekankan kajiannya pada situasi politik Thailand yang berlangsung tepat saat hasil pemilihan umum diperoleh dan pergolakan yang dihadapi oleh Move Forward pasca memenangkan pemilu dan bagaimana Srettha Thavisin muncul sebagai perdana menteri, bukan dari partai utama pemenang pemilu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Paetongtarn Shinawarta memerlukan ruang diskusi yang lain.

Dinamika politik di Thailand begitu jelas menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan langkah dan kebijakan dari setiap aktor dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang dinilai mendatangkan hasil terbaik bagi dirinya. Segmentasi masyarakat dalam hal ideologi dan pilihan politik menunjukkan besarnya perbedaan kepentingan masing-masing pihak serta menggerakkan mereka untuk berkompetisi dalam tiap momentum politik. Posisi Thailand sebagai salah satu negara penting di kawasan Asia Tenggara memperkuat signifikansi subjek ini untuk dijadikan sebagai bahan kajian oleh penulis, disamping perlunya memperhatikan kebijakan Thailand terkait penegakan Hak Asasi Manusia sebagai elemen integral dalam upaya menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan dalam mendalami kajian terhadap peristiwa politik di Thailand. Sumber penelitian ini berasal dari laporan-laporan resmi, seperti laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, tulisan ilmiah dalam bentuk jurnal-jurnal yang terpercaya maupun buku sehubungan dengan perkembangan politik Thailand dari masa ke masa, serta lansiran berita dari

media internasional dan nasional yang memuat perkembangan situasi di Thailand dengan relevansi pada isu yang diangkat penulis.

Upaya memahami dinamika politik dan perebutan kepentingan antar aktor dalam tulisan ini akan ditelaah menggunakan teori Konstruktivisme sebagai lensa analitis. Penulis memanfaatkan gagasan Alexander Wendt mengenai interaksi intersubjektif, nilai dan norma serta konstruksi sosial yang menjadi nilai utama dalam teori ini untuk mendiskusikan bagaimana konvergensi kepentingan antar aktor dapat terjadi pada satu waktu dan berseberangan pada waktu yang lain.

Kepentingan dapat menjadi jawaban atas pertanyaan terhadap dinamika yang terjadi pada interaksi antar aktor. Konstruktivisme dinilai dapat menjelaskan mengapa Pheu Thai dan Move Forward yang awalnya berada dalam satu perahu kemudian menempuh rute berbeda dan dapat memaknai konstruksi identitas yang terjadi ditengah masyarakat Thailand sebagai dasar semangat bensin perjuangannya, secara khusus mengenai kelompok pemuda di Thailand gencar menggaungkan perubahan dan kelompok pro-militer dan kerajaan yang konservatif.

PEMBAHASAN

Dinamika Politik di Thailand pada Abad ke-21

Thailand dikenal lekat dengan gejolak politik di dalam negeri. Sejak menganut sistem Monarki Konstitusional pada tahun 1932 hingga saat ini Thailand telah mengalami 11 kali kudeta atau perebutan kekuasaan, belum termasuk upaya percobaannya yang menyentuh 30 kali (Djuyandi et al., 2023). Manuver politik domestik Thailand semakin kental terasa di awal abad ke-21 saat Thaksin Shinawatra mengguncang lanskap politik negara itu dengan keberhasilannya merebut hati mayoritas rakyat Thailand di tahun 2001. Thaksin secara mencengangkan mampu menjadi aktor non royalis kerajaan yang mampu memenangkan pemilihan umum. Posisi Thaksin di tampuk kekuasaan terus diguncang dan menghasilkan krisis politik yang merenggut banyak korban jiwa. Pada tahun 2005-2006 Thaksin Shinawatra harus mengasingkan diri ke luar negeri dan dipaksa lengser dari posisinya

sebagai Perdana Menteri melalui kudeta yang digawangi pihak militer (Sidik, 2023). Para kubu yang kontra Thaksin menganggap ia tidak mampu menemukan solusi konflik berkepanjangan di kawasan selatan dengan kelompok yang dilabeli separatis oleh pemerintah.

Puncak kemarahan publik adalah saat keluarga Thaksin dinilai mengakali pembayaran pajak saat menjual aset nasional ke investor Singapura dengan profit 1.9 milyar dolar untuk keluarga Thaksin (BBC, 2023). Thaksin dikudeta dalam krisis politik di masa-masa ini, khususnya pada masa menjelang pemilu dengan hasil bahwa pemilu Thailand dibatalkan, konstitusi dan parlemen dibubarkan, serta pembatasan akses terhadap saluran informasi baik lokal maupun internasional. Undang-undang keadaan darurat diluncurkan militer sebagai bagian dari aksi kudeta, sekaligus melarang berlangsungnya demonstrasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Sebagai respon terhadap peristiwa kudeta ini, pendukung Thaksin maupun pihak yang menentang melancarkan aksi masing-masing melalui gelombang proses yang berlangsung intens. Di tahun 2006, salah satu peristiwa penting muncul dengan bergantinya pimpinan Thai Rak Thai dari Thaksin menuju jenderal Sonthi Boonyaratglin (Djani, 2011).

Impian menghadirkan Thailand yang adil dan merata pembangunannya merupakan landasan-landasan filosofis bagi kemunculan kelompok-kelompok pro-perubahan yang berupaya untuk meruntuhkan struktur politik yang telah mapan terbangun. Isu ini dianggap seksi oleh partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin untuk menggalang dukungan luas dari masyarakat. Mereka mendekatkan diri dengan masyarakat kelas bawah dan menaruh isu pemberantasan kemiskinan sebagai agenda politik mereka yang utama. Partai Thaksin menjanjikan kebijakan publik yang menjadi sangat populer karena mengupayakan subsidi ekonomi, bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat dan khususnya penyediaan layanan kesehatan umum bagi seluruh masyarakat. Isu ini dipandang menjadi jawaban untuk persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. Ditambah dengan dampak buruk dari krisis tahun 1997 yang masih segar di benak masyarakat Thailand,

sorotan terhadap elit politik terus diberikan, sembari membuka ruang popularitas yang semakin meningkat bagi Thaksin dan janji-janji politiknya (Hewison, 2015).

Keberadaan pemerintah sebagai kekuatan super dengan dukungan elit-elit politik menjadi perhatian penuh dari rakyat yang merasa bahwa pemerintahan di Thailand menempatkan kelompok tertentu pada posisi tidak tersentuh, sementara rakyat berhadapan dengan berbagai persoalan yang tak kunjung usai. Posisi di pemerintahan dianggap menjadi dasar kelompok yang berkepentingan untuk melanggengkan struktur politik yang eksklusif sementara rakyat kebebasannya disandera. Konsekuensi fenomena ini adalah besarnya kesenjangan di antara masyarakat Thailand. Sebagai pembanding, pada tahun 2007, masa dimana gejolak politik Thailand cukup kuat terasa pasca kudeta militer terhadap Thaksin, isu kesenjangan yang digaungkan rakyat adalah mengenai kemampuan 10% keluarga terkaya untuk mengakuisisi 51% kekayaan di negara ini, sementara hanya sekitar 8,5% kekayaan yang tersebar di antara 50% keluarga paling miskin di Thailand. Belum lagi aset-aset seperti tanah dan rumah dikuasai sebanyak 90% hanya oleh 10 persen dari total populasi (Hewison, 2015).

Kemelut politik Thailand masih terus berlanjut dengan dua peristiwa besar dalam kurun waktu dua tahun, yakni perseteruan yang melibatkan Perdana Menteri Samak Sundarajev dengan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang adalah pendukung monarki dan militer di tahun 2008. PM Samak sendiri berhaluan sama dengan Thaksin Shinawatra. Tahun 2009 dan 2010, Thailand kembali dihadapkan pada krisis yang menysar Abhisit Vejjajiva yang berada di sisi monarki dan militer (Sidik, 2023). Kelompok militer pada masa ini menghadapi tekanan dari kelompok masyarakat pendukung Thaksin yang sering disebut sebagai Kelompok Baju Merah yang meragukan proses pemilu yang memenangkan Abhisit Vejjajiva. Gejolak ini menelan korban sekitar 90 orang dan lebih dari 1000 orang mengalami luka-luka (BBC News Indonesia, 2012).

Tahun 2014 menandai naiknya Prayut Chan-ocha sebagai Perdana Menteri Thailand. Sebuah proses kontestasi politik yang amat intens

menandai peristiwa kudeta militer terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, merespon protes berkepanjangan yang terus muncul pada akhir tahun 2013 hingga awal menuju pertengahan tahun 2014. Protes ini menyasar kebijakan Yingluck yang dinilai terlalu populis, diantaranya adalah subsidi beras yang dinilai oleh para demonstran sebagai langkah yang menguntungkan pendukung Yingluck semata, terlebih dengan pembelian beras dari petani di atas rata-rata harga pasar. Buntut protes berkepanjangan ini adalah munculnya status darurat militer yang kemudian menempatkan pemimpin tertinggi militer Jenderal Prayuth Chan Ocha untuk secara resmi mengambil alih tanggung jawab perdana menteri Thailand. Berbagai upaya negosiasi yang diupayakan untuk mendamaikan kelompok pendukung Yingluck maupun masyarakat anti-Yingluck tidak membuahkan hasil. Militer mengambil alih atas kegiatan masyarakat Thailand seperti pemberlakuan jam malam, hingga membatasi akses informasi yang dinilai dapat menghasilkan polemik baru di tengah situasi yang sudah tidak stabil (Kasriansyah, 2018). Salah satu misteri yang berusaha dipecahkan adalah alasan sesungguhnya di balik peristiwa kudeta terhadap pemerintahan Yingluck karena pada saat-saat tersebut masyarakat Thailand sejatinya tidak benar-benar menangkap sinyal ini dan menjalankan kehidupan yang normal. Peristiwa ini lantas dipandang berkaitan erat dengan luka lama yang dimiliki pihak-pihak terkait terhadap keluarga Shinawatra (Galan Prakoso, 2017).

Pemilu Thailand Tahun 2023: Kemelut Politik dan Antiklimaks Jalan Perubahan.

Pemilihan umum di Thailand membuka babak baru dengan pamor partai-partai kontra pemerintah-militer yang mencuri perhatian masyarakat dan menjadi pemain kuat dalam kontestasi politik Thailand. Dalam pemilihan di tahun 2023, partai dengan aliran progresif secara berurutan merengkuh suara mayoritas di pemilihan umum yakni, Move Forward disusul partai Pheu Thai yang lebih mapan dan selanjutnya ditempati partai Bhumjaithai. Partai yang disebut terakhir memanfaatkan isu-isu di masyarakat pedesaan sebagai jalan untuk menarik dukungan dari masyarakat Thailand. Posisi di bawahnya baru bermunculan partai

pendukung pemerintah yang harus menelan pil pahit karena tertinggal dari partai pendatang baru yang progresif, yakni Palang Pracharat, yang dipimpin oleh mantan wakil perdana menteri dan kepala angkatan darat Prawit Wongsuwan, dan United Thai Nation, yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta tahun 2014 (Pangestu, 2023).

Kemenangan resmi Move Forward di pemilihan umum tahun 2023 disambut dengan gegap gempita oleh para pendukung Pita Limjaroenrat, termasuk dengan melaksanakan berbagai konvoi dengan menggunakan truk oranye dan memekikkan dukungan dan kebahagiaan mereka. Harapan membunyah dengan keberhasilan Move Forward merengkuh 152 kursi di parlemen, disusul Pheu Thai dengan jumlah 141 kursi. Dalam komposisi di parlemen, kedua partai ini memang telah memperoleh kekuatan mayoritas dari total kursi parlemen sebanyak 500 orang. Tantangan yang dihadapi Move Forward dalam jalan mendudukkan Pita sebagai Perdana Menteri yang baru adalah pada keberadaan anggota senator yang pada 2017 dibentuk oleh rezim militer seiring kudeta, dimana 250 orang senator yang dipilih langsung oleh junta militer juga memiliki suara untuk memilih Perdana Menteri. Oleh karenanya, pekerjaan berat Pita adalah memenuhi kuota mayoritas yakni sebanyak 376 suara, sementara di saat yang sama gabungan koalisi Move Forward dan tujuh partai lainnya masih berada di angka 313 suara (Küing, 2023).

Pita gagal memenuhi suara minimum di parlemen dan Thailand kini telah resmi melantik Perdana Menteri yang baru. Partai Pheu Thai menempatkan anggotanya yakni Srettha Thavisin untuk memerintah Negeri Gajah Putih. Naiknya Srettha sebagai Perdana Menteri yang baru dilalui dengan jalan panjang dan berliku sebagai bagian dari dinamika politik yang melibatkannya dengan Move Forward yang memenangkan kursi terbanyak di pemilu Mei lalu. Proses politik yang buntu selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Keberhasilan Srettha naik menjadi Perdana Menteri Thailand tak lepas dari manuver politik yang dilakukan Pheu Thai sebagai pemenang kedua pemilu, dimana Pheu Thai mengalihkan haluannya dari Move Forward selaku anggota koalisinya yang gagal merengkuh mayoritas

suara perlemen setelah dua kali diblokir. Dalam persekutuan yang baru, Pheu Thai bahkan bergabung dengan dua partai dari kalangan mantan seteru militer mereka di antara total 11 partai yang menjadi anggota koalisi. Naiknya Sretththa Thavisin sebagai Perdana Menteri yang baru sekaligus membangkitkan kembali memori tentang Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand yang digulingkan oleh kudeta militer, karena ia dianggap sebagai seseorang yang bergerak beriringan dengan haluan politik Thaksin (DW, 2023).

Kuatnya koneksi antara naiknya Sretththa Thavisin sebagai Perdana Menteri dan indikasi kembalinya pengaruh Thaksin Shinawatra terlihat dalam saat-saat mendekati keberhasilan Pheu Thai memenangkan kursi mayoritas di parlemen. Setelah sekian lama mengasingkan diri dari kejaran pemerintah junta militer yang mengkudetanya, Thaksin kembali ke Thailand beriringan dengan upaya Pheu Thai membentuk pemerintahan baru, pasca kebuntuan yang terjadi selama berbulan-bulan sejak pemilihan umum dilaksanakan. Manuver politik Pheu Thai berlangsung dalam intensitas yang amat tinggi, sehubungan dengan perubahan mendasar yang terjadi khususnya dengan haluan partai Pheu Thai dengan koalisi barunya saat ini.

Partai oposisi yang kini menjadi anggota dalam koalisi baru adalah partai dari kelompok konservatif garis keras, yang notabene berseberangan dengan Pheu Thai dengan pendekatan progresif. Jonathan Head dalam tulisannya menyebutkan bagaimana perubahan besar Pheu Thai mendekati diri dengan kelompok oposisi, salah satunya dengan bahkan menggadeng partai ultra-royalis United Thai Nation, sebuah partai yang berseteru dengan keluarga Thaksin hingga menjungkalkan adik perempuan Thaksin, Yingluck dari kepemimpinannya. Dari sisi kelompok ultra-royalis, koalisi dengan Pheu Thai mau tidak mau harus diterima mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh Move Forward, dan oleh generasi muda Thailand yang menuntut pembahasan soal kekuasaan dan kekayaan monarki. Keluarga Shinawatra kini menjadikan keberhasilan menduduki kursi pemerintahan lagi serta menjamin kesepakatan untuk mengembalikan

Thaksin sebagai hal yang paling utama daripada mengkhawatirkan reputasi partai (Head, 2023b).

Masa Depan Demokrasi di Thailand Pasca Pemilihan Umum Tahun 2023

Hasil pemilihan umum di Thailand dan gejolak politik yang berlangsung pasca pemilu menyisakan dua hal kunci bagi Thailand. Pertama, kemenangan Move Forward yang spektakuler menjadi validasi semangat perubahan yang telah lama menggeliat di tengah-tengah masyarakat. Setelah bertahun-tahun melayangkan berbagai bentuk protes terhadap pemerintah yang berkuasa dan menggalang dukungan dalam kontestasi politik yang bergulir, kelompok pemuda-pemudi Thailand yang menjadi motor pendukung perubahan memperoleh angin segar dengan kemenangan Pita di pemilu tahun 2023. Proses politik dalam rangka menetapkan Perdana Menteri yang baru memang menjadi nestapa bagi kelompok pendukung Move Forward, namun demikian keyakinan untuk membawa perubahan telah merangsek masuk lebih jauh dan menjadi harapan masyarakat untuk mewujudkan iklim demokrasi yang diimpikan di negaranya.

Kedua, proses pemilihan Perdana Menteri yang berakhir antiklimaks bagi Move Forward menghadirkan tantangan yang amat berat bagi kelompok pro perubahan dalam memanifestasikan perjuangannya melalui pemilihan umum. Keberhasilan dalam memperoleh mayoritas dukungan dalam pemilihan umum belum akan cukup untuk mencapai tujuan kelompok pro perubahan, karena masih harus memenangkan suara mayoritas senator sebagai proses yang perlu ditempuh untuk menetapkan Perdana Menteri terpilih. Langkah kelompok pro-perubahan akan semakin berat karena bukan hanya berhadapan dengan kelompok pendukung kerajaan namun juga kini harus melawan Pheu Thai, partai politik yang populis dan kini turut berpihak dengan kelompok konservatif.

Penegakan demokrasi di Thailand kerap diparalelkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, sebuah hal yang umum terjadi di seluruh negara lainnya. *Lese majeste* menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Thailand untuk menyuarakan pendapatnya. Pemerintah Thailand merujuk

pada Pasal 12 terkait Kode Kriminal pada *Lese Majeste* yang mencakup pengenaan hukuman hingga 15 tahun penjara bagi pihak-pihak yang dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyoar para kritikus yang vokal melawan monarki dan tidak sedikit masyarakat yang menjadi tahanan praperadilan, dimana mereka dilarang mengikuti demonstrasi, bepergian ke luar negeri, dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu monarki. Catatan Human Rights Watch dalam laporannya mengemukakan setidaknya ada 35 aktivis hingga September 2023 yang ditahan oleh pemerintah dengan dalih melakukan kegiatan yang menyinggung monarki (Human Rights Watch, n.d.)

Amnesty Internasional turut menyoro aspek pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berjalan lamban dan tidak menampilkan perubahan yang diharapkan pada era pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai. Masih begitu banyak masyarakat yang menghadapi opresi pemerintah melalui aparat keamanan Thailand ketika hendak menyatakan aspirasinya, seperti nampak pada para demonstran berisikan pemuda-pemuda berkisar 1.954 orang yang dihadapkan dengan berbagai tuduhan karena partisipasinya dalam demonstrasi sepanjang tahun 2020-2022. *Lese majeste* sekali lagi menjadi dalih yang digunakan oleh pemerintah Thailand dan aparat keamanan atas semua pengenaan tuduhan dan penahanan yang dilakukan (Céline-Agathe Caro, 2024).

Laporan Thai Lawyers for Human Rights yang dimuat oleh Human Rights Watch menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Juli 2020 hingga September 2023, setidaknya terdapat 1.928 orang yang dituntut karena menggunakan hak berpendapat dan bergabung dalam perkumpulan umum yang damai. Di antara jumlah yang dituntut tersebut, bahkan terdapat sebanyak 286 anak di dalamnya. Di aspek lainnya, bagi mereka yang berekspresi melalui media sosial, pemerintah mengenakan *Computer-Related Crimes Act and Criminal Code article 116* terkait penghasutan sehingga menjadijalan untuk melakukan tuntutan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 saja, setidaknya 258 orang memperoleh tuntutan dari pemerintah

karena aktivitasnya di media sosial yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap *lese majeste* (Human Rights Watch, n.d.).

Perkembangan politik Thailand yang berkejolak dalam beberapa tahun terakhir membawa Thailand memperoleh skor yang cukup rendah dalam penilaian Freedom House, yakni 36 dari total 100 poin di tahun 2023 (Freedom House, 2024). Namun demikian, perlu dicermati bahwa Freedom House dalam laporannya mencatat pula kemajuan Thailand dalam hal pelaksanaan pemilu di tahun 2023 dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya di 2019. Pemilu tahun 2023 menghadirkan kompetisi yang ketat, bahkan berujung kemenangan bersejarah Move Forward, yang mana merupakan situasi berbeda dengan tahun 2019 dengan begitu besarnya pengaruh militer dan kerajaan, membuat pemilu pada masa itu mengundang skeptisisme yang besar.

Konflik kepentingan di Thailand berkisar antara para kelompok konservatif yang dalam hal ini sangat loyal pada militer dan kepada keluarga kerajaan (Hewison, 2023) dan kelompok progresif yang menggaungkan perubahan secara spesifik pada amandemen konstitusi, reformasi militer hingga desentralisasi kekuasaan politik dan anggaran (Hopkins, 2020). Interaksi yang terjadi di antara berbagai kelompok tersebut akan membuat kepentingan yang dimiliki menjadi bertautan atau justru berseberangan. Situasi politik Thailand memuat dengan baik pandangan pendukung Konstruktivisme tentang betapa cairnya interaksi antar aktor dalam hubungan internasional yang digerakkan ide, norma, identitas seperti dikatakan Reus-Smith, dimuat dalam tulisan Sopamena (2024). Alexander Wendt, salah satu pemikir utama Teori Konstruktivisme, sebagaimana dielaborasi Budrich dalam tulisannya (Budrich, 2013) menjelaskan bahwa realitas dibentuk secara sosial, sehingga kita dapat menyaksikan dinamika kepentingan dan keputusan yang diambil oleh aktor.

Pada mulanya, Move Forward dan Pheu Thai berjalan beriringan sebagai partai koalisi utama memiliki visi bersama pada proses kontestasi politik dengan upaya untuk memberikan tekanan terhadap militer dan pihak kerajaan. Pheu Thai memanfaatkan isu-isu populis di tengah masyarakat

Thailand. Hal ini telah sejak masa kepemimpinan Thaksin Shinawatra dijalankan oleh Pheu Thai dan populisme dijadikan pendekatan untuk menarik dukungan masyarakat. Keinginan untuk terjadinya perubahan memang tidak mudah, mengingat keberadaan Thailand yang menganut sistem monarki konstitusional. Peran negara dan pemerintah secara khusus pihak kerajaan amat sulit tersentuh. Jalan perubahan di Thailand lantas diupayakan dengan menggalang dukungan masyarakat dengan afiliasi identitas maupun perhatian pada elemen kehidupan mendasar seperti keadilan ekonomi untuk menantang posisi pemerintah berkuasa. Bagian ini dijelaskan dengan baik oleh Hewison dalam tulisannya (Hewison, 2015) dimana masyarakat Thailand oleh Thaksin Shinawatra diajak untuk bersatu dengan tuntutan-tuntutan yang bernuansa reformis. Kelompok masyarakat di pedesaan dan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menjadi sasaran kampanye Thaksin untuk menyuarakan ketidakpuasan dalam birokrasi pemerintahan Thailand, menyuarakan pemerataan ekonomi di antara seluruh lapisan masyarakat.

Move Forward dalam kontestasi politik di Thailand memanfaatkan kejenuhan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi yang tajam, dilanjutkan dengan semangat kaum muda yang begitu besar untuk menuntut kebebasan. Bagian terpentingnya tentu saja upaya membatasi kekuasaan Raja Thailand dan pengaruh kerajaan di kehidupan masyarakat, termasuk langkah berani mendobrak *lese majeste*. Move Forward secara tegas mengambil jarak dengan partai berbasis dukungan militer dan kerajaan, sementara Pheu Thai enggan menutup penuh kemungkinan ini (Alderman, 2023). Situasi Pheu Thai diperparah dengan menyusutnya hubungan mereka dengan pemilih muda yang jauh lebih transformatif, bergerak melampaui ide keberhasilan ekonomi semata (Cleo Anne A. Calimbahin, Khoo Ying Hooi, Rui Graça Feijó, Siripan Nogsuan Sawasdee, Chum Chandarin, 2023). Meski memiliki penekanan pendekatan yang berbeda Move Forward dan Pheu Thai berada di perahu yang sama, khususnya sepanjang pelaksanaan pemilu, melandaskan tujuannya pada

reformasi dan transformasi kehidupan masyarakat Thailand yang lebih adil dan bebas.

Situasi berbanding terbalik usai pemilihan umum. Move Forward ditinggalkan oleh Pheu Thai yang memilih bergabung dengan partai yang berbasis dukungan militer dan pro keluarga kerajaan. Pelopor Konstruktivisme percaya bahwa sulit menemukan teman dan musuh abadi. Move Forward yang sejak awal berkoalisi dengan Pheu Thai hingga berhasil memenangkan pemilihan umum harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan sekutunya. Begitu pula Pheu Thai yang begitu berseberangan dengan partai pro militer dan kerajaan hingga membuat mereka begitu populer karena posisi politik tersebut kini justru berjalan bersama dalam koalisi yang baru pasca kegagalan Move Forward mendudukkan Pita sebagai Perdana Menteri. Bagi Konstruktivis pertukaran ide, norma, nilai hingga pengetahuan menjadi faktor penyebab dinamisnya sikap para aktor dan relasinya satu dengan yang lain.

Kegagalan Move Forward menempatkan Pita sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru dan perubahan haluan Pheu Thai menyisakan tanda tanya besar bagi masa depan demokrasi dan perubahan-perubahan progresif di Thailand. Beberapa hal berikut menjadi amat penting untuk dicermati sebagai bagian-bagian pokok yang berpengaruh terhadap situasi Thailand; Pertama, kegagalan Pita Limjaroenrat menjadi Perdana Menteri Thailand bukanlah akhir segalanya. Gerakan demokrasi di Thailand bukan soal Pita semata, meski Ia begitu populer dan kharismatik. Ini lebih pada telah terbentuk kelompok mayoritas masyarakat Thailand yang hendak menggantikan partai pro militer dan kerajaan, dimana masyarakat ini bercirikan muda, terdidik, dan progresif (Ioanes, 2023). Proses tawar menawar politik di parlemen Thailand memang menegaskan pengaruh besar partai pro militer dan kerajaan, namun di tengah-tengah masyarakat gelombang dukungan transformasi amat kencang dan menghasilkan kekalahan telak dalam pemilihan umum. Partai pro militer dan kerajaan wajib menata ulang dan mengevaluasi kebijakannya bila tidak ingin kehilangan dukungan yang semakin besar dalam pemilu berikutnya. Hasil

pemilihan umum yang memenangkan Move Forward sebagai partai pendatang baru merupakan sinyal bahwa masyarakat hendak beranjak dari pemerintahan Thailand yang konservatif.

Kedua, Move Forward perlu memastikan kemenangan mutlak dalam pemilihan umum berikutnya untuk dapat memastikan memantapkan kemenangan dalam pemilu dengan keberhasilan memiliki Perdana Menteri dari partai mereka sebagai pemenang utama pemilu. Hal ini adalah jalan untuk menghindari kegagalan serupa di parlemen terulang kembali. Tantangan bagi Move Forward adalah menemukan rekan koalisi baru yang mampu melejit cepat dalam beberapa tahun kedepan untuk menjadi substitusi sepadan bagi Pheu Thai yang telah berseberangan.

Ketiga, tantangan terbesar bagi terwujudnya wajah Thailand yang baru di masa depan adalah pada bagaimana Pheu Thai akan memainkan kartu politiknya. Pheu Thai selama ini menjadi besar karena memainkan isu populis dan menyasar masyarakat marjinal Thailand. Masuknya Pheu Thai dalam koalisi partai pro militer dan kerajaan memunculkan kemungkinan perubahan sikap dari masyarakat loyalis partai. Bila loyalis partai ini menarik dukungan secara besar-besaran dari Pheu Thai, maka peta kekuatan di parlemen dalam pemilu berikutnya akan bergeser, terutama bila dukungannya berpindah kepada Move Forward dan partai progresif lainnya. Antiklimaks jalan perubahan di Thailand pasca pemilihan umum tahun 2023 bukanlah lembaran akhir dari cerita kemelut politik antara kelompok loyalis kerajaan dan para idealis perubahan.

KESIMPULAN

Kegagalan Move Forward menempatkan Pita Limjaroenrat sebagai Perdana Menteri Thailand adalah sebuah antiklimaks, namun tetap menyisakan secercah harapan akan perubahan di Thailand. Tekanan partai berbasis militer dan pengaruh kerajaan menjadi alasan utama kegagalan Move Forward memenangkan lobi politik penentuan PM Thailand. Kelompok pro-militer dan kerajaan semakin menguasai parlemen dengan

kerbehasilannya menarik Pheu Thai yang notabene merupakan partai oposisi kedalam garbong yang sama.

Masa depan perubahan Thailand menuju demokrasi dan kebebasan yang lebih luas dipengaruhi sangat besar oleh kemampuan Move Forward memenangkan pemilu dengan margin yang besar daripada partai pendukung kerajaan. Move Forward harus memastikan tidak memerlukan pemilihan di parlemen dalam mendudukkan kandidatnya sebagai Perdana Menteri Thailand. Bagian lain yang vital adalah arah dukungan masyarakat loyalis partai Pheu Thai, dimana partai ini berubah haluan dari kelompok oposisi menjadi pro-militer dan kerajaan. Move Forward dapat memanfaatkan perubahan haluan Pheu Thai untuk menarik dukungan dari masyarakat yang kecewa karena Pheu Thai tidak lagi memperjuangkan visi yang sama. Dengan bergabungnya Pheu Thai dengan kelompok pro-kerajaan maka secara otomatis menempatkan Move Forward sebagai partai utama yang dilirik oleh masyarakat Thailand, baik kelompok pemuda maupun kelompok yang lebih tua untuk memperjuangkan perubahan dan memberi Thailand wajah baru yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderman, P. (2023). *Can Thailand move forward past its historic 2023 election?*. Central European Institute of Asian Studies. <https://ceias.eu/can-thailand-move-forward-past-its-historic-2023-election/>
- BBC. (2023, April 5). Profile: Thaksin Shinawatra. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13891650>
- BBC News. (2020). Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran dan bersedia melawan hukum? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54566339>
- BBC News Indonesia. (2012). *Mantan PM Abhisit Vejjajiva resmi didakwa*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121213_thailand_abhisitvejjajiva_didakwa
- Budrich, V. B. (2013). Social constructivist theory Book. In *International Relations; A Self-Study Guide to Theory*. https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvdf09vd.12.pdf?refreqid=fastly-default%3Ad68e2084bd31028e1d529b9c7a15558b&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&initiator=search-results&acceptTC=1
- Céline-Agathe Caro, S. P. (2024). *Thailand's Quest for Democracy and the Rule*

of Law. <https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/thailands-streben-nach-demokratie-und-rechtsstaatlichkeit>

- Cleo Anne A. Calimbahin, Khoo Ying Hooi, Rui Graça Feijó, Siripan Nogsuan Sawasdee, Chum Chandarin, D. S. (2023). Current Electoral Processes in Southeast Asia. Regional Learnings. In G. Facal (Ed.), *Current Electoral Processes in Southeast Asia. Regional Learnings* (p. 89). Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC). <https://doi.org/10.4000/books.irasec.7628>
- Djani, L. (2011). *Implikasi Politik dari Reformasi di Thailand*. <https://indoprogress.com/2011/02/implikasi-politik-dari-reformasi-di-thailand/>
- Djuyandi, Y., Delsita, T., Fahira, G., & Askhia, D. (2023). Hubungan Sipil Dan Militer Melalui Dinamika Kudeta Militer Di Thailand. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 119–127. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.51415>
- DW. (2023). *Srettha Thavisin Terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand*. <https://www.dw.com/id/srettha-thavisin-terpilih-sebagai-perdana-menteri-thailand/a-66604910>
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024 Thailand*. <https://freedomhouse.org/country/thailand/freedom-world/2024>
- Galan Prakoso, S. (2017). The Path of Military Power Interference in the Politics of Thailand. *Global South Review*, 1(1), 79. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28822>
- Head, J. (2023a). *Pemilu Thailand: Partai oposisi menimbulkan “gempa politik”, mayoritas pemilih menolak kekuasaan militer*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgxlgl0jq47o>
- Head, J. (2023b). Thailand: Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra kembali setelah 15 tahun di pengasingan. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66577738>
- Hewison, K. (2015). *Ketidakterataan Dan Politik Di Thailand* (17). <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/ketidakterataan-dan-politik-di-thailand/>
- Hewison, K. (2023). *Thailand’s Orange Wave: Progressives, Conservatives, and Monarchy*. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/thailands-orange-wave-progressives-conservatives-and-monarchy/>
- Hopkins, D. (2020). *Progressive politics in Thailand’s polarised polity*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/progressive-politics-thailand-s-polarised-polity>
- Human Rights Watch. (n.d.). *Thailand Events of 2023*. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/thailand>
- Ioanes, E. (2023). *Thailand’s democracy could still move forward — even*

without Pita. <https://www.vox.com/world-politics/2023/7/22/23804053/thailand-democracy-pita-prime-minister-prayuth>

Kasriansyah. (2018). Dampak Kudeta Militer Terhadap Pariwisata Thailand. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1011–1026. <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries2012/>

Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok. (2020). Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand. In *Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bangkok, Thailand*. <https://kemlu.go.id/download/L1B1Ymxpc2hpbmdJbWFnZXMvTWVpJTlWmJAYMC9TVVJBVCUyMEVEQVJBTiUyMGRhbiUyMEtyaXRlcmlhJTlwUGVtYmF0YXNhbi9CdWt1JTIwU2VsYXlhbmclMjBQYW5kYW5nLnBkZg==>

Küng, J. (2023). *Pembentukan Pemerintahan di Thailand Masih Belum Jelas*. <https://www.dw.com/id/pembentukan-pemerintahan-di-thailand-masih-belum-jelas/a-65708684>

Lillahi, K. (2015). Kudeta Militer. *Sindonews.Com*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12206>

Pangestu, D. A. (2023). Pemilu Thailand 2023: akankah demokrasi hidup kembali di Thailand dan apa saja tantangannya? *The Conversation*. <https://theconversation.com/pemilu-thailand-2023-akankah-demokrasi-hidup-kembali-di-thailand-dan-apa-saja-tantangannya-205760>

Sidik, J. M. (2023). Thailand Kembali Diintai Krisis Politik. *Antaraneews*. <https://www.antaraneews.com/berita/3632574/thailand-kembali-diintai-krisis-politik>

Sopamena, C. A. (2024). KONSTRUKTIVISME: DAMPAK PELEMAHAN KONSTITUSI TERHADAP PEMERINTAH, STUDI KASUS KPK RI. *Jurnal Dinamika Global*, 9(2), 275–298. <https://doi.org/10.36859/jdg.v9i2>